

## Buruh Mengeluh

**D**EMONSTRASI buruh menolak upah murah dan praktik alih daya alias *outsourcing* menghasilkan moratorium atas *outsourcing*, kendati belum sampai kepada pemenuhan upah layak ("PR", 4/10/2012). Aktivitas seperti itu dapat membangun keyakinan bahwa memperjuangkan nasib senantiasa memerlukan pengerahan massa, seperti halnya memperoleh keadilan lainnya. Namun, jika upaya seperti itu terus dijalankan, energi bisa banyak terbuang, termasuk energi banyak orang yang terhambat karena demo.

Bisa jadi hubungan buruh-majikan ini tidak berada dalam keharmonisan dan senantiasa dikondisikan seperti *anjing jeung ucing*, saling berhadapan, saling mengakali, dan tidak saling memercayai. Bila hal ini terjadi, hubungan perburuhan berada dalam ancaman yang bisa saling meniadakan bahkan saling mengancam, termasuk dalam bentuk demonstrasi atau PHK, suatu kondisi yang tidak nyaman dalam dunia buruh sehingga bisa melahirkan buruh yang beringas, majikan yang bengis.

### "Nyombo"

Kehadiran pemerintah penting untuk membangun harmoni antarkedua belah pihak. *Trie partiet* ataupun Panitia Penyelesaian Peselisihan Perburuhan Pusat/Daerah (P-4P/D) tampaknya tidak dapat menyelesaikan persengketaan keduanya. Bisa saja pengusaha berada pada prinsip memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin. Faktor upah bisa digunakan sebagai upaya menuju ke arah sana. Atau



**Asep Sumaryana**

Kepala LP3AN, Lektor Kepala Jurusan Administrasi Negara FISIP Unpad

mungkin dengan *outsourcing* diharapkan faktor produksi ini menjadi lebih ringan.

Bisa jadi buruh tidak banyak memenuhi harapan pengusaha, kecuali memenuhi persyaratan untuk menggunakan tenaga kerja lokal dalam produksinya. Pemerintah sendiri merasa diuntungkan karena pengangguran dapat berkurang sehingga menjadi dagangan politik. Sementara untuk memperoleh upah layak, buruh harus berjuang dengan cara berpindah-pindah kerja atau melakukan demonstrasi. Di seberang sana, pengusaha sudah siap dengan ancaman PHK bagi buruhnya yang menyerengai.

Dengan alasan rasionalisasi atas produksinya, PHK pun dapat terjadi secara sembunyi ataupun massal. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sering tidak mempan mengancam pengusaha untuk berlaku bijaksana atau menunda PHK. Pengusaha bisa memandang jika dirinya diperlukan pemerintah untuk menolong menyediakan lapangan kerja. Tidak heran jika lahan sejumlah industri pun disiapkan kendati harus mengorbankan lahan pertanian yang subur. Tidak jarang juga aliran sungai yang mengairi persawahan dan perikanan harus dikorbankan karena limbah yang tidak kunjung selesai kendati disiapkan BPLHD atau sejenisnya.

Posisi seperti di atas itulah yang mendorong pemerintah harus *nyombo* agar pengusaha tetap *kerasan* berinvestasi. Secara internal, perizinan investasi direformasi agar cepat melayani investor. Hal demikian dapat menguatkan kesan jika investor sedang *diogo* pemerintah agar tidak pindah ke lain hati. Dampaknya dapat membuat keberpihakan menjadi tidak seimbang. Kerugian bisa lebih besar ketimbang manfaat yang dirasakan dalam jangka panjang. Mungkin anak cucu bangsa ini tinggal menikmati limbah industri setelah madunya diserap habis investor.

### "Handap asor"

Industrialisasi tampaknya sedang mengubah kehidupan bangsa ini dari agraris. Bukan hanya populasi buruh yang terus bertambah mengalahkan petani, tetapi juga kultur petani yang pekerja keras sambil menunggu panen berubah menjadi perahan yang diupah murah. Petani yang bisanya sabar tatkala panen gagal tidak lagi ditemui dalam dunia industri karena senantiasa ada di bawah pengawasan mandor yang siap menghukum bila kerjanya tidak serius. Hal demikian mengubah sikap dan perilaku, serta bisa berdampak stres dalam kehidupan keseharian.

Perubahan besar ini perlu disikapi pemerintah dengan mereformasi sejumlah kebi-

jakan yang membiarkan upah murah dan merugikan buruh. Selain itu, promosi penyediaan lapangan kerja tidak boleh diidentikkan dengan mengundang investor untuk mengurus kandungan alam dan penduduk, tetapi dengan pemberdayaan sumber daya lokal agar mampu menjadi kekuatan besar di bumi sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, ketergantungan kepada pihak lain terus berkurang dan didorong agar menjadi bangsa mandiri yang tidak didikte oleh kekuatan mana pun.

Membangun kondisi ideal seperti di atas memerlukan kesungguhan seluruh komponen bangsa. APBN/APBD tampaknya menjadi media untuk mewujudkannya. Kontribusi rakyat melalui pajak bermakna kesungguhan rakyat untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Pengelolannya perlu dipercayakan kepada sejumlah aparat dan pejabat yang amanah. *Bancakan* APBN/APBD yang penyidikannya sering terbengkalai membuat kepercayaan semakin berkurang, apalagi jika digunakan untuk memberikan keleluasaan kepada investor mengurus bumi dan kekayaan lainnya.

Melalui visi dan misi yang telah ada, kekuatan anggaran dan sumber daya diarahkan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, perilaku pelaksana perlu digiring untuk mengoptimalkan potensinya ke arah sana. Rokeach (1984) memagarinya dengan nilai yang dapat membangun perilaku tertentu. Melalui norma yang memuat sanksi, nilai dapat digiring untuk dipatuhi. Agar hal demikian dapat diwujudkan, sejumlah pihak mesti dapat terlibat. Kelompok pen-

didik, petinggi negeri, anggota perwakilan rakyat mesti memberikan teladan yang baik agar tidak menjadi bagian dari masalah bangsa ini.

*Courage* (Moelyono, 2004) merupakan kunci dari perwujudan di atas. Pemimpin yang berani menegakkan norma dan visi menjadi idaman rakyat. Dengan demikian, koruptor dapat dipercepat penindakannya, hama bangsa disikat dengan gagah berani, pengganjal kemakmuran rakyat di-amputasi, dan dalam menghadapi investor pun berani tidak menggadaikan harga diri bangsa untuk alasan penyediaan lapangan kerja. Akhirnya, diperlukan keberanian untuk mengevaluasi setiap kinerja bawahannya yang *memble* dan menggantinya dengan kalangan profesional. Mungkin dengan cara demikian buruh pun akan berhenti mengeluh.\*\*\*